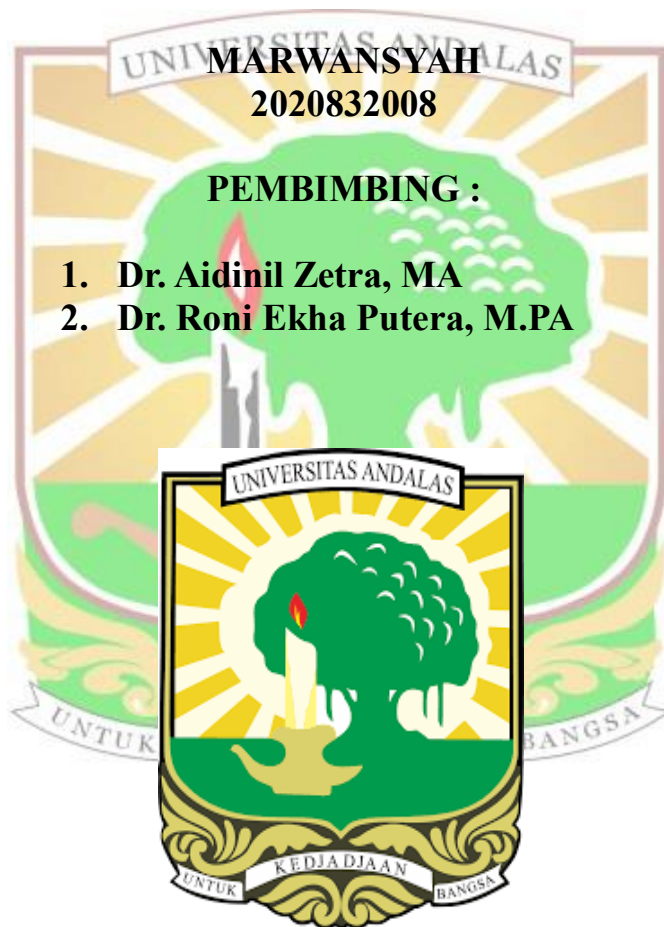


**PERAN *CIVIL SOCIETY ORGANIZATION* DALAM  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
(Studi Kasus Perumusan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka  
Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045)**

**TESIS**

**OLEH:**



**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
TAHUN 2024**

## ABSTRAK

Nama : Marwansyah  
Program Studi : Magister Ilmu Politik  
Judul : Peran *Civil Society Organization* Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Perumusan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045)

Setelah menjabat selama lebih kurang 3 tahun Gubernur Sumatera Barat dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi dan Audy Joinaldy, dihadapkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045. Tentunya penyusunan perencanaan bukanlah pekerjaan yang sederhana, perlu ketelitian dan kesungguhan pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun langkah-langkah perencanaan pembangunan untuk 20 tahun kedepan. Oleh karena itu penyusunan RPJPD 2025 – 2045 menjadi suatu keharusan untuk dilakukan secara substantif dengan mengikut sertakan masyarakat sipil. Menurut Affan Ghafar CSO (*Civil Society Organization*) merupakan kekuatan penyeimbang yang mencegah terjadinya dominasi sepihak oleh negara dan lembaga politik. Namun peranan CSO didalam penyusunan kebijakan ini masih belum maksimal dalam kapasitas isu dan masalah yang seharusnya dikembangkan baik dari CSO maupun pemerintah sebagai inisiator dalam perumusan kebijakan. Dalam penelitian ini, perspektif *civil society* dalam perumusan kebijakan menjadi krusial untuk mengembangkan kualitas demokrasi. Satu kasus menarik untuk dielaborasi dalam penelitian ini adalah peranan *civil society* sebagai lembaga yang turut berperan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan peranan masyarakat sipil atau CSO pada agenda penyusunan kebijakan RPJPD 2025 – 2045. Penelitian ini menggunakan konsep peran CSO. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian menggunakan studi kasus dengan jenis intrinsik. Jenis penelitian ini digunakan karna terdapat kasus yang cukup kompleks untuk diteliti. Dalam hal ini melihat bagaimana peran masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045. Berdasarkan data dan temuan penelitian, dapat diungkapkan bahwa peran CSO dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah belum maksimal, kehadiran CSO masih bersifat normatif dan administratif, sementara itu pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat belum mampu menggali potensi CSO secara maksimal dalam perumusan perencanaan pembangunan, dan belum memiliki peta CSO secara baik untuk kemudahan pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi pembangunan daerah.

**Kata Kunci: *Civil Society*, CSO, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Kebijakan Publik**

***ABSTRACT***

Name : Marwansyah  
Study Program : Master of Political Science  
Title : The Role of Civil Society Organizations in Development Planning (Study of Policy Formulation of the Regional Long-Term Development Plan of West Sumatra Province Year 2025-2045)

After serving for approximately 3 years the Governor of West Sumatra and Deputy Governor of West Sumatra, Mahyeldi and Audy Joinaldy, are faced with preparing the Long-Term Development Plan of the West Sumatra Provincial Government for 2025-2045. Of course, the preparation of planning is not a simple job, it needs thoroughness and seriousness of the West Sumatra Provincial Government to develop development planning steps for the next 20 years. Therefore, the preparation of the RPJPD 2025-2045 is a must to be done substantively by including civil society. According to Afan Ghafar, CSOs (Civil Society Organization) is a balancing force that prevents unilateral domination by the state and political institutions. However, the role of CSOs in the preparation of this policy is still not maximized in the capacity of issues and problems that should be developed both from CSOs and the government as an initiator in policy formulation. In this research, the perspective of civil society in policy formulation is crucial to developing the quality of democracy. One interesting case for elaboration in this research is the role of civil society as an institution that plays a role in policy formulation. The purpose of this study is to determine and explain the role of civil society or civil society organizations in the RPJP 2025 - 2045 policy formulation agenda. Based on data and research findings, it can be stated that the role of CSOs in formulating regional development planning is not yet optimal, the presence of CSOs remains normative and administrative, while the local government of West Sumatra Province has not been able to fully tap into the potential of CSOs in formulating development planning, and does not yet have a good map of CSOs for the ease of implementing coordination and collaboration in regional development.

**Keywords: *Civil Society*, CSO, Long Term Development Plan, Public Policy**